**PERAN POLISI LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU DALAM MENINDAK PELANGGARAN LALU LINTAS
PADA PELAJAR SMP DI PEKANBARU**

Oleh: Tiara Fitra Erisman/ 1401114271

tiarafitra1@gmail.com

Pembimbing : Drs Yoskar Kadarisman M.Si

Yoskar66@gmail.com

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jalan.HR Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru Panam
Pekanbaru 28293 Telp/Fax 0761-63272

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polresta Pekanbaru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran Polisi Lalu Lintas dalam menindak pelanggaran pemakaian sepeda motor pada pelajar SMP yang ada di Pekanbaru, khususnya mereka yang membawa sepeda motornya ke sekolah. Teknik penentuan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling* karena penulis telah menetapkan beberapa kriteria di dalam pemilihan subjek sebanyak 5 orang dan 3 diantaranya bertugas khusus dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas pada pelajar sekolah yaitu SD, SMP, SMA, serta Perguruan Tinggi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh murid smp yang sering tidak memakai kelengkapan keselamatan dan tidak memiliki surat ijin mengemudi. Tindakan penindakan pelanggaran tersebut antara lain dengan cara pencegahan dan pemberantasan. Tindakan pencegahan dalam mengurangi pelanggaran dalam penggunaan sepeda motor pada pelajar di Pekanbaru yaitu memberikan sosialisasi atau penyuluhan ke baik itu sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA, juga untuk orang tua. Selain itu, Satlantas Polresta Pekanbaru juga memberikan demonstrasi perihal Safety Riding di sekolah-sekolah, serta memberikan informasi melalui media massa. Adapun sebagai tindakan represif, diadakan razia di waktu tertentu dengan memeriksa kelengkapan kendaraan dan surat ijin mengemudi serta memberikan tilang sebagai bukti pelanggaran.

Kata Kunci : pelajar SMP, pelanggaran, sepeda motor, polisi lalu-lintas

**ROLE OF POLICE OFFICERS AT THE CITY REESORT PEKANBARU
TRAFFIC POLICE IN CRACKING DOWN ON TRAFFIC VIOLATIONS AT
MIDDLE SCHOOL STUDENTS IN PEKANBARU**

By : Tiara Fitra Erisman/ 1401114271

tiarafitra1@gmail.com

Supervisor : Drs Yoskar Kadarisman M.Si

Yoskar66@gmail.com

*Department of Sociology Faculty of Social and Political Sciences Universitas
Riau Campus Bina Widya Jln. HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Panam
Pekanbaru 28293 Tel / FAX 0761-63272*

Abstract

This research was conducted at the Satlantas Polresta Pekanbaru, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru. The purpose of this study is to analyze the role of Traffic Police in dealing with violations of the use of motorcycle in junior high school students in Pekanbaru, especially those who take their motorcycle to school. The sampling technique is done by purposive sampling because the writer has set a number of criteria in the selection of subjects as many as 5 people and 3 of them have a special duty in handling traffic violation cases in school students such as elementary, junior high, high school, and college. Data collection methods in this study are observation, in-depth interview and documentation. The results of the study found that traffic violations are carried out by junior high school students who often do not use safety equipment and do not have a driver's license. The acts of prosecution of violations include prevention and eradication. Preventive actions in reducing violations in the use of motorcycle for students in Pekanbaru such as providing good information or counseling to schools from elementary, junior high, high school, also for parents. In addition, Satlantas Polresta Pekanbaru also provided demonstrations regarding Safety Riding in schools, as well as providing information through mass media. As for repressive act, raids were held at certain times by checking the completeness of vehicles and driving licenses and giving tickets as proof of violations.

Keywords: middle school students, violation, motorcycle, traffic police

1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi menurut Bowersox (1981), transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana produk di pindahkan ketempat tujuan dibutuhkan. Dan secara umum transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (barang dan/barang) dari suatu tempat ketempat lain, baik dengan atau tanpa sarana. Transportasi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting, sangat vital dan strategis dalam kehidupan manusia, perekonomian, dan pembangunan Negara. Sangat pentingnya transportasi bagi manusia maka ada yang menyatakan bahwa transportasi adalah setua dengan peradaban manusia.

Tidak di pungkiri transportasi juga menjadi masalah bagi kehidupan di perkotaan dilihat dari segi penggunanya banyak terjadi masalah. Salah satu matriks kota sebagai ciri kota yang modern, maju ialah tersedianya sarana transportasi yang memadai. Fungsi peranan dari transportasi ini banyak yang disalah artikan oleh pelaku pengendara tersebut, sehingga banyak bermunculan masalah transportasi yaitu tertib berlalu lintas, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai aturan Hukum dari pihak kepolisian, pencurian sepeda motor, seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta bertambahnya jumlah penduduk.

Dengan semakin berkembangnya zaman terutama di

kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan membuat peranan transportasi menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia, sejalan dengan tingkat kemajuan ekonomi dan kemakmuran suatu Negara. Demikian juga dengan adanya perkembangan teknologi yang terus menerus semakin menambah jumlah kendaraan sehingga berpengaruh terhadap lalu lintas di perkotaan dalam hal meningkatnya mobilitas penduduk di Perkotaan, baik kendaraan roda dua, roda empat pribadi maupun kendaraan angkutan umum. Perilaku yang tampak pada masyarakat di perkotaan pun berubah yaitu masyarakat lebih agresif, perilaku pengguna kendaraan bermotor pun seenaknya di jalan dapat menyebabkan stress yang berujung pada perilaku agresif karena itu dapat terjadinya pelanggaran lalu lintas, karena transportasi mencakup berbagai bidang yang saling berkaitan erat dengan perilaku mengemudi. Perubahan yang terjadi ini berdampak pada tata cara individu dalam mengemudikan kendaraan yang sepenuhnya belum tentu menjalankan tata tertib berlalu lintas untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Di samping itu, ciri-ciri sebuah kota ialah adanya sarana dan prasarana yang berhubungan dengan Transportasi, masalah transportasi di kota-kota besar di Kota Pekanbaru ialah salah satunya manusia sebagai pelaku dalam disiplin dan kebijaksanaan lalu lintas dan alat transportasi (kendaraan pribadi dan kendaraan umum). Kedua masalah tersebut saling berkaitan erat di dalam suatu system Perkotaan. (B.N. Marbun, SH, 1979).

Menurut peraturan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur cara berlalu lintas. Untuk menciptakan masyarakat yang tertib dengan cara meningkatkan disiplin masyarakat berlalu lintas. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan (Pasal 7 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti fenomena yang terjadi di Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar SMP di Kota Pekanbaru berjudul :

Peran Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pelajar SMP di Pekanbaru

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran polisi lalu lintas dalam menindak pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMP di Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dari terlaksananya peran polisi lalu lintas dalam menindak pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMP di Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran polisi lalu lintas dalam menindak pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMP di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari terlaksananya peran polisi lalu lintas dalam menindak pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMP di Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah memberikan sumbangan ilmiah pada pengembangan Sosiologi Perkotaan, khususnya tentang Sosiologi Hukum yang berkaitan erat dengan peran Aparat Kepolisian dalam menindak pelanggaran lalu lintas pada pelajar SMP di Kota Pekanbaru, yang umumnya banyak terjadi. Memberi pengetahuan tentang teori yang bersangkutan khususnya dari penelitian ini ialah teori peran, teori tindakan sosial, norma-norma sosial meliputi norma hukum dan penegakan hukum. Dapat dijadikan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan disiplin berlalu lintas, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini ialah dapat membantu dan memberikan masukan dan saran kepada pihak berwajib seperti Aparat Kepolisian, pihak Sekolah, masyarakat meliputi warga yang tinggal disekitar sekolah yang menyediakan tempat parkir serta yang melihat terjadinya pelanggaran. Peran orangtua juga berperan penting dalam mendidik anaknya

2.LANDASAN TEORI

2.1. Teori Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Soerjono Soekanto (2002:243) mengartikan peran yaitu aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia sudah menjalankan suatu peran.

2.1.2. Peran Polisi Lalu Lintas

Dalam sistem lapisan masyarakat terdapat lembaga-lembaga yang mengatur pengendalian sosial, salah satu diantaranya ialah polisi. Polisi adalah aparat Negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban. Peran polisi tidak hanya menangkap, menyidik, menindak, dan menyerahkan pelaku tindak pidana ke lembaga hukum. Polisi

juga berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang yang berperilaku menyimpang dari hukum serta kepada masyarakat umum. (Kun Maryati & Suryawati, 2006 : 146).

2.2. Konsep Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo, 2009 mengatakan defenisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Menurut Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

1. Faktor hukum sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta

dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan Kualitatif yaitu berupa metode yang bersifat Deskriptif. Metode deskriptif ialah dengan cara menggambarkan suatu objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan fokus penelitian di Saltlantas Polresta Pekanbaru. Dimana objek dari penelitian ini ialah pelajar SMP yang melakukan pelanggaran lalu lintas diantaranya yang membawa kendaraannya kesekolah dan terdapat juga mengendarai ke jalan raya. yang mana pelajar tersebut membawa kendaraan sepeda motornya tidak memakai helm, tidak mempunyai kelengkapan surat-surat berkendara serta ugal-ugalan di jalan.

3.3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini menggunakan pendekatan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah salah satu strategi dalam menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu pemilihan subjek dalam penelitian didasarkan atas ciri-ciri yang memenuhi tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan diantaranya :

1. Yang mana bertugas baik di dalam maupun di lapangan.
2. Khusus melayani masalah pelanggaran lalu lintas
3. Bertugas sebagai Polantas minimal dua tahun

Berdasarkan kriteria tersebut maka subjek penelitian yang ditetapkan yaitu 1 Orang Kasat/Wakasat yang diwakilkan oleh Kaur Bin Ops (Kepala Urusan Pembinaan Operasional (1), dan Kasubnit Dikyasa (1) (Kepala Sub Unit Pendidikan dan Rekayasa Masyarakat), 3 orang petugas kepolisian Lalu Lintas yang tugasnya antara lain, 2 Orang anggota dari unit Dikyasa, 1 orang Bamin Tilang (Bintara Administrasi Tindakan Pelanggaran).

3.4. Sumber Data

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang berada di lokasi objek penelitian dan juga yang termasuk dari subjek penelitian. Diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini data primer peneliti ialah wawancara langsung dengan *key informan* dan *informan* seperti tertera diatas.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data primer yang kita butuhkan sebagai pendukung dari penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder peneliti dapatkan ialah dari data lapangan berupa dokumen-dokumen, foto-foto yaitu data dari pihak kepolisian Polresta Pekanbaru

meliputi data pelanggaran lalu lintas ditinjau dari profesi pelanggar, dan pendidikan pelanggar, foto-foto yang mana terjadi pelanggaran pada pelajar SMP, dan foto dokumentasi Polantas pada saat melakukan tindakan dalam bentuk pencegahan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya penelitian. Dari penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti ambil ialah:

3.5.1 Observasi (Pengamatan)

Metode Observasi ialah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan menggunakan panca indra.

3.5.2. Wawancara Mendalam (*Dept Interview*)

Metode wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan bertujuan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan *informan* dan *key informan* atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara

3.5.4. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi sosial berupa surat-surat, catatan-catatan, laporan dll. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan foto pelajar yang memarkirkan sepeda motornya,

dan mengendarai di sekitar sekolah maupun di jalan raya, wawancara dengan pihak kepolisian Satlantas Polresta Pekanbaru khususnya Unit Dikyasa serta keadaan lokasi Sat Lantas Polresta Pekanbaru.

3.6 .Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses lanjutan dari proses pengelolaan data dari hasil yang sudah ada pada tahap hasil pengolahan data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil wawancara secara langsung. (Bambang Lina Miftahul, 2005:184

4. PERAN POLANTAS DALAM MENINDAK PELANGGARAN LALU LINTAS PADA PELAJAR SMP DI PEKANBARU

4.1. Penerapan Peran Berdasarkan Perspektif Pengendalian Sosial dan Penegakan Hukum

4.1.1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Sat Lantas Polresta Pekanbaru Unit Dikyasa telah melakukan kegiatan dalam tindakan pencegahan (preventif) ini terutama dalam menindak Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pelajar SMP di Kota Pekanbaru. Adapun tindakan preventif yang dilakukan oleh Sat Lantas Polresta Pekanbaru khususnya pada Unit Dikyasa adalah sebagai berikut :

4.1.1.1. Melakukan Sosialisasi/Penyuluhan (Edukasi) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Dalam Sosiologi disebut juga sebagai teori mengenai peran (*role theory*), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Program ini dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru dalam hal ini ialah Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unit Dikyasa) yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang mana terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan program sosialisasi peraturan lalu lintas di sekolah-sekolah. Salah satu ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dalam perjanjian antara Satlantas Polresta Pekanbaru dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu :

- Melakukan sosialisasi peraturan lalu lintas;
 - Mencegah pelanggaran lalu lintas;
 - Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas;
 - Meningkatkan disiplin berlalu lintas;
 - Mewujudkan program Polisi Clik(Pocil), Polisi Sahabat Anak (Polsanak), Police Goes To School, dan Patroli Keamanan Sekolah, serta Polce Goes To Campus.
- a. Police goes to School merupakan program Unit Dikyasa Sat Lantas Polresta

Pekanbaru. Yang mana bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Adapun materi dari Police goes to School yang diberikan oleh Unit Dikyasa yaitu materi berlalu lintas yang baik dan sopan, taat dan patuh terhadap peraturan berlalu lintas.

4.1.1.2. Melakukan Safety Riding di Lingkungan Sekolah

Safety Riding merupakan kegiatan untuk keselamatan berkendara. Kegiatan tersebut mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berkendara serta kiat-kiat aman berkendara, Keterampilan dan keahlian berkendara yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi bekerjasama dengan sektor bisnis, media dan LSM. yang ditujukan kepada siapa saja baik pelajar, masyarakat umum, pengemudi angkutan umum. Tujuannya adalah guna meningkatkan kemampuan serta kesadaran berlalu lintas serta untuk keselamatan. Implementasi *safety riding* ialah melalui kegiatan tur, pelatihan dan pendidikan berkendara.

4.1.1.3. Melakukan Penghimbau Melalui Media Massa dan Elektronik

Satlantas Polresta Pekanbaru dalam melakukan tugasnya untuk terciptanya Keamanan, keselamatan, tertib, lancar lalu lintas (Kamseltibcar lantas) khususnya di unit Dikyasa yang secara langsung menghimbau kepada masyarakat umum maupun pelajar hingga mahasiswa dengan cara memberikan

informasi seputar lalu lintas melalui media massa maupun media elektronik. Seperti keselamatan berkendara (*safety riding*), dan sebagainya yang berkaitan dengan lalu lintas. Adapun bentuk-bentuk dari media cetak meliputi Koran, Buletin tentang lalu lintas yang secara langsung dipegang oleh Kaur Bin Ops. Sedangkan media elektronik ialah media sosial yaitu : instagram, facebook, blog atau website Satlantas Polresta Pekanbaru dan juga radio.

Salah satu program dari Sat Lantas Polresta Pekanbaru Unit Dikyasa ialah memberikan penghimbauan tentang lalu lintas yang baik dan benar, patuh terhadap peraturan lalu lintas melalui media massa dan media elektronik seperti salah satunya menghimbau kepada masyarakat melalui siaran radio, Polresta Pekanbaru juga bekerja sama dengan instansi penyiaran radio yang ada di Kota Pekanbaru. Seperti Radio RRI, Radio Barata.

4.1.2. Tindakan Represif

Tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dengan penegakan hukum serta penjatuhan hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini Sat Lantas Polresta Pekanbaru menggunakan istilah penegakan hukum. Dalam praktiknya kebanyakan pelajar SMP yang melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak memiliki SIM, memodifikasi kendaraan bermotor, tidak memakai helm. Dan bentuk pelanggaran yang lainnya.

4.1.2.1. Melakukan Pemeriksaan Kendaraan (Razia)

Salah satu wewenang Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 antara lain, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Untuk melaksanakan wewenang tersebut di atas, pemerintah menetapkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Angkutan Jalan yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan .

Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas. Dalam pemeriksaan ini meliputi surat-surat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor dan fisik kendaraan. Begitu pula wewenang pemeriksaan dalam mengambil tindakan apa yang dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan. Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan diatas, baik yang bersifat pencegahan (*preventif*) maupun pemberantasan (*represif*) yang pelaksanaannya kegiatan simpatik, penindakan,

pelanggaran dan penyidikan laka lantasi.

Satlantas Polresta Pekanbaru bertugas sebagai Pembina fungsi Lantasi jajarannya dalam meneruskan kebijaksanaan Pemerintah Pimpinan dan juga sebagai pelaksanaan operasional di bidang lalu lintas perlu kiranya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelaksanaan Razia untuk pedoman pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam rangka Penegakan Hukum di bidang lalu lintas. Berikut adalah Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan (Razia) Sat Lantasi Polresta Pekanbaru yaitu :

1. Persiapan

Sebelum melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dengan menggunakan Blanko Tilang perlu dilakukan persiapan sebagai berikut:

- a. Blanko Tilang yang sudah di cap/stempel kesatuan sesuai dengan kebutuhan termasuk tabel pelanggaran dan uang titipan.
- b. Ballpoint (warna hitam atau biru)
- c. Alat pelapis set Blanko Tilang (Hard Board)
- d. Label barang bukti
- e. Secara stasioner (tempat) menyiapkan papan pemberitahuan razia.
- f. Secara Hunting (Bergerak) Pasal 111 KUHAP.

2. Prosedur

Adapun prosedur di dalam melaksanakan razia ialah sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas.
- b. Acara Pengarahan Pimpinan (APP)
- c. Pembagian Tugas:

- d. Petugas yang mengurangi kecepatan.
 - e. Petugas yang menghentikan kendaraan.
 - f. Petugas yang melaksanakan pemeriksaan.
 - g. Petugas yang melaksanakan penindakan dengan Tilang.
 - h. Petugas yang mengamankan barang bukti
- Petugas yang melaksanakan pengaman lokasi
- #### 3. Pelaksanaan

Sebelum melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan (razia) haruslah memperhatikan pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Lokasi dilaksanakan di jalan umum, dimana di jalan umum yang lurus dan bebas pandangan sehingga tidak mengganggu Kamseltibcar lantasi dan ketertiban umum. Di lokasi razia harus dipasang papan petunjuk tentang pelaksanaan razia.
- b. Razia dilakukan secara mandiri oleh personil lalu lintas.
- c. Setelah segala sesuatu telah dipersiapkan maka penindakan dapat secara langsung dilakukan di tempat.
- d. Proses tilang yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk sidang diberikan surat Tilang yang dilakukan dengan tindakan penyitaan berupa STNK, SIM, atau sepeda motor.

Tidak semua pengendara yang melanggar akan diberi surat tilang tetapi hanya diberikan teguran. Teguran ini berupa Teguran Lisan dan Teguran Tertulis. Teguran lisan yaitu teguran berupa nasehat ditempat. Sedangkan teguran tertulis diberikan surat tilang tanpa ada penyitaan barang bukti dan

tembuskan kepada orangtua/kepala sekolah.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan kendaraan (razia) oleh Polisi Lalu Lintas Sat Lintas Polresta Pekanbaru, adapun hasil tindakan yang berupa hukuman jera sebagai berikut:

1. Teguran lisan

Teguran lisan diberikan kepada pelajar sekolah terutama SMP yang kedatangan melanggar aturan lalu lintas terutama dalam hal kelengkapan surat-surat kendaraan. Teguran lisan ini merupakan tindakan awal dari pihak kepolisian apabila kedatangan melanggar yang melewati pos penjagaan polisi, dan ketika pihak Sat Lintas Polresta Pekanbaru melakukan penertiban jalan di pagi hari. Polisi menjelaskan aturan yang berlaku sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009. Untuk pelanggaran kelengkapan surat kendaraan hanya dalam bentuk teguran lisan, tetapi untuk pelanggaran lain seperti modifikasi sepeda motor, balapan liar, ngebut-gebutan di jalan, tidak memakai helm dan berboncengan lebih dari dua biasanya kendaraan sepeda motor akan disita dan selanjutnya menyurati atau memanggil orangtua/wali dari pelanggar.

2. Teguran Tertulis

Teguran tertulis diberikan kepada pelajar SMP apabila tidak mengindahkan teguran secara lisan dari pihak kepolisian Sat Lintas Polresta Pekanbaru. Teguran tertulis diberikan langsung kepada orang tua/wali dari siswa yang kedatangan melanggar peraturan tersebut.. Dalam hal ini polisi meminta orang tua atau wali untuk mengawasi anaknya dan menghimbau agar tidak

memfasilitasi dan mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor.

3. Tilang

Bukti pelanggaran atau tilang merupakan denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang akan diberikan apabila pelajar SMP kedatangan mengendarai sepeda pada saat dilakukan razia (pemeriksaan kendaraan) di jalan-jalan besar dimana jalan tersebut juga sering dilewati oleh pelajar sekolah tersebut. Pihak kepolisian akan memberikan tilang kepada pelajar sekolah apabila tidak memakai helm, modifikasi kendaraan, berboncengan lebih dari dua dan pastinya tidak memakai helm yang telah dilakukan secara berulang-ulang.

Penyelesaian kasus tilang yang melibatkan pelajar sekolah akan diberikan sanksi berupa denda dan selanjutnya dilakukan dengan memanggil kedua orang tua/wali. Dalam hal ini apabila orang tua tidak memenuhi panggilan dari pihak kepolisian berikan, akan di selesaikan di pengadilan.

4.2 Hambatan/Kendala Polantas Dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pelajar SMP

4.2.1. Hambatan dalam Bentuk Tindakan Pencegahan (Preventif)

1. Kesadaran Tertib Berlalu Lintas Sebagian Masyarakat Masih Rendah

Dalam hal ini dapat dilihat dari banyaknya angka pelanggaran lalu lintas oleh pelajar sekolah mulai dari SMP hingga SMA di Kota

Pekanbaru. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran berlalu lintas dari sebagian siswa siswi SMP serta orang tua dari siswa siswi SMP masih rendah. Praktikanya sebagian orangtua juga masih banyak membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor sebagai sarana transportasi ke sekolah. Seharusnya orangtua paham hal itu telah melanggar peraturan, apalagi orangtua pastinya sudah mengetahui bahwa anaknya belum memiliki SIM dikarenakan masih dibawah umur.

Hal ini menjadi hambatan bagi Sat Lantas Polresta Pekanbaru dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMP. Selain itu masyarakat yang juga berada di sekitar sekolah terutama oknum yang menyediakan tempat parkir, juga menjadi hambatan bagi pihak kepolisian karena telah memperbolehkan adanya anak sekolah pelajar SMP yang mengendarai kendaraan sepeda motornya ke sekolah dan memarkirkannya di rumah warga yang menyedia tempat parkir tersebut.

2. Personil yang kurang memadai

Dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah personil Sat Lantas Polresta Pekanbaru berjumlah 118 orang, untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar SMP yaitu masih banyaknya mengendarai sepeda motor ke sekolah ialah yang khusus menindaknya yaitu bagian Unit Dikyasa terutama untuk tugas preventif sebelum terjadi pelanggaran. Personil pada unit Dikyasa ini berjumlah 6 orang yang mana jumlah personil tersebut masih

terbatas serta belum memadai, dikarenakan jika ada acara-acara penting seperti pengamanan demo, pejabat dari luar datang, dan lain-lain. hal inilah yang menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan rutin setiap minggunya.

4.2.2. Hambatan Polantas dalam Bentuk Tindakan Represif (Pemberantas)

1. Masih Banyaknya Pelajar yang Membawa Kendaraan Sepeda Motor ke Sekolah

Pelanggaran lalu lintas adalah sesuatu perbuatan yang menyimpang dan berlawanan dengan aturan lalu lintas. Salah satunya terjadi pada anak sekolah SMP yang membawa kendaraan sepeda motornya ke sekolah.

Sat Lantas Polresta Pekanbaru dalam hal ini yang bertugas khusus yaitu pada Unit Dikyasa yang secara langsung turun ke lapangan yaitu ke sekolah-sekolah mulai dari TK,SD,SMP,SMA, hingga ke Perguruan Tinggi. Adapun tugas yang dilakukan di lapangan ialah memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang tata tertib atau aturan berlalu lintas, melakukan safety riding, melakukan penghimbau melalui media elektronik, spanduk, stiker, radio,

5.PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru

dalam hal menindak pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pelajar SMP terbagi menjadi dua tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Adapun tindakan preventif ialah melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah terutama SMP tentang aturan berlalu lintas yang baik dan benar, melakukan safety riding ke semua instansi pemerintah maupun swasta, melakukan penghimbauan melalui media elektronik contohnya pada radio RRI.

2. Dalam melaksanakan peran selama di lapangan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru mengaku mengalami hambatan yang mana hal tersebut menjadikan kinerja Polisi kurang maksimal dan kurang efektif ditinjau dari pelaksanaan peran berupa tindakan preventif dan tindakan represif antara lain 1) pada tindakan preventif hambatan yang dialami oleh Polantas ialah kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat masih rendah hal ini menjadi hambatan Polantas karena masih banyak didapati pelajar SMP yang masih melanggar aturan lalu lintas, Personil yang kurang memadai ini terlihat dengan jumlah personil pada Unit Dikyasa yang mana unit ini bertugas langsung dilapangan melakukan Pendidikan kepada masyarakat serta Rekayasa, maupun melakukan pemeriksaan kendaraan (razia) di jalanan yang berjumlah 6 orang. Hal tersebut menjadi kurang efektif yang mana apabila ada kegiatan rutin menjadi terhambat juga dikarenakan ada kegiatan mendadak lainnya seperti demo.

1.2. Saran

Menarik dari kesimpulan pemaparan yang telah disebutkan diatas,, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dari Peran yang dilakukan oleh Polantas Polresta Pekanbaru perlu dibentuknya program berupa aturan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas terutama dikalangan pelajar SMP, untuk sarana dan prasarana lalu lintas lebih diperbanyak tidak hanya dijalan raya saja, tetapi dijalan kecil-juga, seperti memasang spanduk.
2. Untuk hambatan kepada masyarakat kesadaran tertib berlalu lintas masih rendah, terutama SMP agar mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi dengan cara tidak mengendarai kendaraan kesekolah, maupun ke jalan raya. Orangtua juga berperan penting dalam hal ini agar diutamakan keselamatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu.1982, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Berry. David. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi / David Berry ; penerjemah, Paulus Wirotomo - Ed-1., Cet.3-* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- B.N. Marbun, Sh. 1979. *Kota Indonesia dan Masa Depan.* Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta : Prenadamedia Group.
- Chinoy, Ely. 1961. *Society an Introduction to Sociology,* cetakan pertama. New York: Random House.
- Freund, Julien, 1969. *The Sociology of Max Weber* (Penerjemah Mary Ilford). New York : Vintage Books.
- Gerth, H.H. dan Wright Mills (Penerjemah dan editor). 1947. *From Max Weber: Essays in Sociology,* London : Keagan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd.
- Heri, P. 1999. *Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan.* Jakarta: EGC.
- Idrus, M. 2007. *Metode Peneltian Ilmu-Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif.* Yogyakarta : UII Press.
- Ir. Syofian Siregar, M.M. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS.* Jakarta : Kencana.
- J. Dwi Marwoko & Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan.* Jakarta : Kencana.
- M.l. Tobing. S.H. 2005. *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta : Erlangga.
- Nasution. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Levinson, Antonio. 1964. *Public Relation in Society.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis.* Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. Hlm 174. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah.* Surakarta : Universitas Muhammadiyah
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan.* Surakarta : Universitas Muhammadiyah
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum.* Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Hlm.12. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis.* Yogyakarta : Genta Publishing
- Roucek.Joseph. 1951. *Control Social* Toronto New York London: D.Van Nostrand Company,Inc.
- Saleh, R. 2004. *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan*

- Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VII.
- Secher, H.P. 1962. *Concept in Sociology by Max Weber*. New York. The Citadel Press.
- Sevilla, C. G.et.al. 1960. *Research Methods*. Quezon City: Rex Printinng Company.
- Soedarto. Hlm 113. *Kapita Selektta Hukum Pidana, op.cit.*
- Soekanto, Soerjono, 1973. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta. Bharata
- Soekanto. Soerjono. 1985. *Max Weber, Konsep-Konsep Dasar dalam Sosiologi*. Jakarta : CV. Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & d*. Bandung :Alfabeta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yunita T. Winarto. 2008. *Karya Tulis Ilmiah Sosial*, Jakarta : Pustaka
- Zaidan. Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.